



BUPATI KARIMUN

**KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 60 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA DAN JABATAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Perangkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karimun, perlu Menunjuk dan Menetapkan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nama dan Jabatan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
13. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1044 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Karimun Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 98);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penunjukkan dan Penetapan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN TENTANG PENETAPAN NAMA DAN JABATAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Nama dan Jabatan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karimun pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai (PPPK) Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan nama/jabatan dan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Besaran Honorarium Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Perangkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari :

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja dalam jabatan;
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Plt,Pjs atau Pj mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja dalam jabatan;
3. Kepala SKPKD selaku PPKD mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;

- 4. Pejabat Eselon III A Perangkat SKPKD mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
- 5. Pejabat Eselon III B Perangkat SKPKD mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
- 6. Pejabat Esselon IV A Perangkat SKPKD mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
- 7. Fungsional SKPKD mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
- 8. PNS Perangkat SKPKD Kelas 7 mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
- 9. PNS Perangkat SKPKD Kelas 6 mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
- 10. PNS Perangkat SKPKD Kelas 5 mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
- 11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Perangkat SKPKD Kelas 8 mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
- 12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Perangkat SKPKD Kelas 6 mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
Pj.SEKRETARIS DAERAH	b
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	b
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	l
SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 02 JANUARI 2025

BUPATI KARIMUN


AUNUR RAFIQ

4. Pejabat Eselon III A Perangkat SKPKD mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
5. Pejabat Eselon III B Perangkat SKPKD mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
6. Pejabat Esselon IV A Perangkat SKPKD mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
7. Fungsional SKPKD mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
8. PNS Perangkat SKPKD Kelas 7 mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
9. PNS Perangkat SKPKD Kelas 6 mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
10. PNS Perangkat SKPKD Kelas 5 mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Perangkat SKPKD Kelas 8 mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja;
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Perangkat SKPKD Kelas 6 mendapatkan 2 kali dari besaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2025

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR TAHUN 2024
PENETAPAN NAMA DAN JABATAN KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERANGKAT
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA DAN JABATAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DI PPKD
1.	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR PPKD
2.	KEPALA BPKAD	KEPALA BPKAD	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	SEKRETARIS BPKAD	SEKRETARIS BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
4.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH BPKAD	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
6.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPKAD	KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
7.	KEPALA BIDANG ASET DAERAH BPKAD	KEPALA BIDANG ASET DAERAH BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

8.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPKAD	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
9.	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN 2 BPKAD	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN 2 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
10.	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN 3 BPKAD	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN 3 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
11.	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN 2 BPKAD	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN 2 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
12.	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN 1 BPKAD	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN 1 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
13.	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI 1 BPKAD	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI 1 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
14.	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI 2 BPKAD	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI 2 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
15.	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BPKAD	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
16.	KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN & PEMINDAHTANGANAN ASET DAERAH BPKAD	KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN & PEMINDAHTANGANAN ASET DAERAH BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
17.	KATRINA OCTORIANA,S.Kom NIP. 197910072009012009	PERENCANA AHLI MUDA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

18.	RAJA MARDIATY NURLINA,S.E,M.MP NIP. 197503082000122006	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
19.	HAFDALLINA,S.E,M.Ak NIP. 197909142008032001	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
20.	DIANA YULIANTI.,S.M NIP. 198007062005022005	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
21.	SAWALUDDIN ,S.I.P.,M.M NIP. 198009092010011007	ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
22.	MAHENDRA EKA SUSANTO.,S.IP NIP. 198212062009011008	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
23.	TRIAPDI PRIHATINI,SE NIP. 198205052009042002	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN TIM KERJA PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
24.	JUNAIDA,S.I.P NIP. 197505152009012005	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
25.	BAMBANG SETIAWAN,SE NIP. 198504152010011006	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB BIDANG ANGGARAN 1 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
26.	SYARIFAH SYITHA SUSANA,S.IP NIP. 198006022009012006	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN TIM KERJA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN ASET BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

27.	SRI MURYANI,S.M NIP. 198111042005022008	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN SUB BIDANG AKUNTANSI 1 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
28.	FADLI NUGRAHA.,S.STP NIP. 199508242018081001	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN TIM KERJA PENGELOLAAN KAS BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
29.	WIKA INDRIANI.,SE NIP. 198405092019022004	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN SUB BIDANG ANGGARAN 2 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
30.	JENNI.,SE NIP. 198807022020122002	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN SUB BIDANG AKUNTANSI PELAPORAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
31.	TARITA LESMANA.,S.Ak NIP. 198003012009042001	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN TIM KERJA KEUANGAN DAN ASET BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
32.	WILDA GUSTIANI,A.Md NIP. 198008282010012003	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI TIM KERJA KEUANGAN DAN ASET BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
33.	HENNY NOVITA,A.Md NIP. 197611232011012001	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI TIM KERJA PERENCANAAN DAN EVALUASI BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
34.	HERY SATRIADY OKTAVIA,A.Md NIP. 197410192010011004	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN SUB BIDANG ANGGARAN 3 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
35.	FRANS WENNER S,A.Md NIP. 197605042008011019	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI SUB BIDANG ANGGARAN 1 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

36.	NENI TRIANA ,A.Md NIP. 198304202008032003	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI TIM KERJA PENGELOLAAN KAS BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
37.	TENGKU MUHAMMAD AZAN ZULFIKAR NIP. 197903292000121007	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
38.	NURHASANAH NIP. 198101222003122006	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET DAERAH BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
39.	AGUS SUSANDI.,S.Tr.AB NIP. 198108172007011014	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
40.	AGUS SUSILOWANTO.,S.M NIP. 198408142014061002	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN TIM KERJA PENGELOLAAN KAS BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
41.	DUDY KURNIAWAN NIP. 197609092003121011	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN 2 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
42.	RONY KORNIWAN NIP. 197608052008011013	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN 1 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
43.	DONNI RESYIKHANA NIP. 198301242007011007	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN 2 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
44.	SUKENDRO.,SH NIP. 198005112007011004	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB BIDANG AKUNTANSI 2 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

45.	YUSRIZAL NIP. 197507292007011013	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BIDANG AKUNTANSI 2 BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
46.	Drs. M. ROSMANSYAH NIPPPK. 196705162023211001	AHLI PERTAMA ANALIS KEBIJAKAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
47.	ABDUL RAHIM, S.Kom NIPPPK 199011052023211022	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
48.	AHMAD FAZLI MARDIANSYAH, S.Tr NIPPPK 199503072023211015	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
49.	DESRIYANTI, S.Sos NIPPPK 198612262023212026	AHLI PERTAMA ANALIS KEBIJAKAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
50.	DESZANA WILISANTI PUTRI, S.A.P NIPPPK 199112082023212043	AHLI PERTAMA ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
51.	MAULANA BAYU PATI, S.E NIPPPK 198707262023211021	AHLI PERTAMA ANALIS KEBIJAKAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
52.	R. KONY HARIAN DIAN, S.E NIPPPK 198301262023211011	AHLI PERTAMA ANALIS KEBIJAKAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
53.	WIRAHADINATA INDRA PUTRA, S.T NIPPPK 198404102023211019	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

54.	YULIA NINGSIH, S.E NIPPPK 198309252023212024	AHLI PERTAMA ANALIS KEBIJAKAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
55.	MUHAMMAD MUKHTARUDIN.,S.Kom NIPPPK 198608302024211019	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
56.	AZILA.,S.E.I NIPPPK 198608202024212026	AHLI PERTAMA – PERENCANA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
57.	KURATUL AINI.,S.Si NIPPPK 198711212024212036	AHLI PERTAMA – PERENCANA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
58.	ADI PERMADI.,S.E NIPPPK 198804072024211016	AHLI PERTAMA – PERENCANA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
59.	STIYONO.,S.IP NIPPPK 198812262024211017	AHLI PERTAMA – PERENCANA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
60.	ROSWIDA.,S.E NIPPPK 198805242024212040	AHLI PERTAMA – PERENCANA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
61.	DENY CASIOPI.,S.I.Kom NIPPPK 199004122024211029	AHLI PERTAMA – PERENCANA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
62.	RAJA ERNITA.,S.IP NIPPPK 198612262023212026	AHLI PERTAMA – PERENCANA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

63.	DESI WINDASARI.,SE NIPPPK 198201162024212014	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
64.	RAHMAD DENNY KURNIAWAN Amd.Kom NIPPPK 198112082024211006	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
65.	LIZA JULIARNI.,A.Md NIPPPK 198107012024212019	TERAMPIL – ARSIPARIS	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
66.	YULLIA DANIYANTI.,S.A.Md NIPPPK 198507092024212033	TERAMPIL – ARSIPARIS	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
67.	SRI RAMAYANTI.,A.Md NIPPPK 198103212024212009	TERAMPIL – ARSIPARIS	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PARAF KOORDINASI	
Pj.SEKRETARIS DAERAH	b
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	l
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7
SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

63.	DESI WINDASARI.,SE NIPPPK 198201162024212014	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
64.	RAHMAD DENNY KURNIAWAN Amd.Kom NIPPPK 198112082024211006	TERAMPIL-PRANATA KOMPUTER	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
65.	LIZA JULIARNI.,A.Md NIPPPK 198107012024212019	TERAMPIL – ARSIPARIS	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
66.	YULLIA DANIYANTI.,S.A.Md NIPPPK 198507092024212033	TERAMPIL – ARSIPARIS	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
67.	SRI RAMAYANTI.,A.Md NIPPPK 198103212024212009	TERAMPIL – ARSIPARIS	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ